

MENCERMATI PROBLEM PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PENDIDIKAN (SUATU UPAYA MENINGKATKAN SDM BANGSA)*

Erhamwilda**

Abstrak

Mencermati kenyataan pendidikan yang ada sekarang, masih terlalu banyak masalah menimbulkan keprihatinan, kekecewaan, dan kegagalan. Apa yang salah dalam pelaksanaan pendidikan; apakah tataran konsep yang kehilangan jati dirinya, atau tataran aplikasi ? Secara spesifik tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab : (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya masalah dalam pelaksanaan pendidikan, (2) Upaya apa yang dapat dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia masa depan.

Beberapa problema pokok yang turut mempengaruhi mutu pendidikan antara lain : (a) berbagai ketidakjujuran dalam pendidikan (b) Belum sejalanannya kebijakan dengan pelaksanaan, (c) Pelaku pendidikan sebagiannya telah kehilangan idealisme, (d) Pendidikan akhlak dan moral belum mendapatkan perhatian serius.

Kata Kunci : Problem, Pendidikan, Kualitas, Bangsa.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan motor utama dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Melalui pendidikan seorang anak diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi menuju kedewasaan dalam berbagai aspek kepribadiannya. Keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak bangsa seringkali menjadi acuan kemajuan suatu bangsa.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat *survive* di

* Naskah Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen TA 2004/2005

** **Erhamwilda, Dra., M.Pd.**, adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah Unisba

dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyataan dewasa ini Indonesia dilanda dan masih berada di tengah-tengah krisis menyeluruh. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis kebudayaan, krisis moral, dan krisis dalam bidang pendidikan, bahkan berbagai krisis Indonesia dewasa ini, menurut H.A.R. Tilaar (2000), merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Mencermati kenyataan pendidikan yang ada dan dilaksanakan sekarang, ada banyak hal yang cukup menggembirakan, namun masih terlalu banyak pula yang menimbulkan keprihatinan, kekecewaan, dan bahkan kemerosotan. Salah satu persoalan yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan banyak pihak adalah persoalan moral bangsa. Masalah moral boleh dibilang merambah ke berbagai lapisan masyarakat baik pada anak, orang dewasa, maupun yang tua, serta terjadi di berbagai tempat dan situasi. Ketidakjujuran merajalela, korupsi, kolusi, dan nepotisme bukannya semakin berkurang di era reformasi, tapi diprediksi terjadi peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Demokrasi yang dianggap sebagai salah satu bentuk tatanan bernegara dan berbangsa, malah cenderung *kebablasan* menjadi kebebasan berbuat, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.

Memasuki abad XXI dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan **pertama**, sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. **Kedua**, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing di era global. **Ketiga**, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (Fasli Jalal, 2002:1).

Permasalahannya adalah ketidaksiapan bangsa ini menghadapi ketiga tantangan tersebut, karena rendahnya mutu SDM. Menurut hasil survey PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) yang dilaksanakan bulan Maret 2002 sebagaimana dikutip Fasli Jalal (2002 : 2), kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-12, terbawah di kawasan ASEAN yaitu setingkat di bawah Vietnam. Rendahnya kualitas pendidikan ini berdampak terhadap rendahnya kualitas SDM Indonesia. Berdasarkan laporan UNDP tentang *Human Development Index (HDI)* tahun 2002, Indonesia menempati

peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti, jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura (25), Malaysia (59), Thailand (70), dan Brunei Darussalam (32). Di samping itu, berdasarkan laporan *The World Economic From Swedia*, Indonesia memiliki daya saing pada urutan ke 37 dari 57 negara yang disurvei. Dalam kondisi seperti ini tentunya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Sejalan dengan era reformasi dan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan tersebut, aneka konsep untuk melakukan inovasi pendidikan telah banyak digulirkan, misalnya untuk peningkatan mutu lulusan pada berbagai jenjang pendidikan digulirkan dan ditetapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dengan digunakannya KBK di sekolah-sekolah diharapkan dapat memfasilitasi berbagai perkembangan aspek kepribadian peserta didik dan peserta didik bisa belajar sesuai kondisi daerahnya, dapat menggunakan kemajuan teknologi dan komunikasi sebagai alat yang membantu kesuksesan pendidikannya serta diprediksi dapat membantu mempersiapkan SDM Indonesia bisa berperan di era global. Contoh lain untuk memacu sekolah-sekolah meningkatkan mutu, di SLTA dan SLTP diadakan Ujian Akhir Nasional (UAN). Di SMK-SMK untuk mengukur mutu lulusan agar siap memasuki lingkungan kerja maupun studi lanjut dilakukan ujian-ujian terstandar, bahkan ada sekolah dengan standar nasional dan internasional.

Kemudian berbagai pemikiran Barat tentang multi Inteligensi telah turut pula mewarnai berbagai perubahan konsep dalam dunia pendidikan. Tidak kalah pentingnya juga para ahli pendidikan Islam turut pula menunjukkan bahwa berbagai konsep pendidikan bermutu bagi lahirnya *insan kamil* telah semakin banyak ditulis. Konsep-konsep pendidikan Islam tersebut bila dapat diwujudkan tentu akan mampu melahirkan SDM-SDM yang hidup bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa, pada sesama manusia, dan pada alam, sekaligus akan mengantarkan manusia-manusianya ke gerbang kebahagiaan dunia akhirat. Di sisi lain para tokoh muslim telah pula membuktikan bahwa beberapa konsep Barat yang disebut mutakhir dalam teori pembimbingan dan pembinaan anak, berabad-abad yang lalu sudah dirumuskan oleh filosof Islam bahkan secara fondasi yang lebih luas dan dalam, cakupan semua konsep dan temuan empirik Barat tersebut tak pernah lepas dari sumber Al-Qur'an dan Hadits.

Hampir semua konsep yang ada pada pendidikan tentu sudah baik dan diharapkan akan mampu mempersiapkan SDM yang bermutu. Namun

persoalan bangsa Indonesia saat ini mengapa semakin kompleks, bahkan dari hari ke hari kemajuan berpikir dan perkembangan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tak selamanya mendatangkan kesejahteraan lahir batin, kadang-kadang malah kemajuan tersebut diikuti keresahan akan berbagai sikap dan perilaku amoral anak bangsa.

Mencermati dan merenungkan berbagai problem tersebut perlu dikaji ulang letak kelemahan pendidikan Indonesia selama ini, apakah pada tataran konsep yang kehilangan jati dirinya, atau pada tataran aplikasi yang mau tidak mau tergantung pada para pelaku pendidikan itu sendiri, mulai dari pemegang kebijakan pendidikan sampai pada para orang tua, guru, serta dosen sebagai pendidik langsung ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu juga dijawab pertanyaan yang lebih luas yaitu sejauhmana para pelaku pendidikan (para pemegang kebijakan, para pendidik, dan personil yang membantu terlaksananya pendidikan) memiliki idealisme dalam melaksanakan tugasnya? Sejahteramana mereka punya komitmen dengan tugasnya ?

Secara spesifik tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab : (1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya masalah dalam pelaksanaan pendidikan, (2). Upaya apa yang dapat dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Aneka Problema Pendidikan di Indonesia dan Latar Belakangnya

Menurut Sudarwan Danim (2003 : 58), ketika bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan diikuti multi krisis lain, termasuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dunia usaha, tidak relevan lagi untuk secara konotatif mempersepsi kemiskinan sebatas perspektif ekonomi. Pada multitataran perilaku sosial dan kemanusiaan, sebagian bangsa ini benar-benar miskin, ditandai dengan perilaku mengabnormalkan normalitas atau sebaliknya menormalkan abnormaralitas.

Beberapa contoh perilaku tersebut antara lain : *pertama* telah muncul standar ganda (*double standard*) pada pelbagai lapisan masyarakat, misalnya, dalam diskursus tindakan pemberantasan korupsi, disiplin kerja, pesan-pesan bernuansa agamis, seruan berperilaku secara moral,

kebersamaan, kesetaraan jender, penegakan hukum, pembaruan, perilaku pembungkus semangat kerakyatan, dan sebagainya, pada banyak kasus lebih menjelma sebagai utopia ketimbang realitas. Korupsi terus merajalela, disiplin kerja terus melorot, penegakan hukum yang tumpul dan tidak konsisten, distorsi perilaku pada kalangan yang mengaku agamawan, pelanggaran moral di mana-mana, sikap egoistik mementingkan kekuasaan dan kelompok sendiri, kekerasan pada perempuan, tindakan mempertahankan tradisi atau status quo, dan sebagainya cenderung makin subur.

Kedua, pada tataran pendidikan dan pembelajaran, telah terjadi penjungkirbalikan norma edukasi dan akademik, ditandai dengan pemalsuan nilai oleh siswa dan mahasiswa, kebiasaan peserta didik sekedar dapat ijazah, ada kasus dosen yang membuatkan skripsi untuk mahasiswanya dengan bonus khusus, dosen yang tidak pernah menulis karya untuk publikasi, guru dan dosen yang tidak mau dikritik secara akademik oleh siswa atau mahasiswanya, pemalsuan bukti fisik kenaikan pangkat, dosen yang ingin terus menerus di kursi birokrasi kampus ketimbang mengejar prestasi sebagai ilmuwan, siswa dan mahasiswa nyontek pada saat ujian, tradisi belajar yang lemah, dan belum terbentuknya masyarakat belajar.

Ketiga, penjungkirbalikan atas makna nilai-nilai sejati hak-hak asasi manusia, seakan-akan indetik dengan hak pribadi serta tidak peduli dengan hak-hak orang lain.

Keempat, ketertiban umum makin tidak terbentuk, baik di pasar-pasar, di jalan-jalan raya, di objek-objek rekreasi, di manapun tempat-tempat fasilitas umum, dan sebagainya.

Kelima, ketidakpedulian elit kekuasaan dan elit politik atas kepentingan rakyat, ditandai dengan tampilan mereka sebagai *pangreh*, bukan pamong praja.

Keenam, etos kerja pamong praja yang masih relatif rendah, bersamaan dengan itu banyak diantaranya menuntut hak-hak istimewa seakan-akan telah mengabdikan secara total untuk pekerjaan utamanya dan masyarakat.

Ketujuh, perampokan, pengompasan, pencurian, merajalela yang menyebabkan suasana hidup benar-benar tidak nyaman.

Kedelapan, banyak media massa yang mengemas pesan-pesan secara sesuka hati, tidak tahu waktu, “menelanjangi” pribadi orang lain, dan sebagainya dibalik isu kebebasan pers. Inilah sebagian sosok wajah suram, yang menuntut waktu cukup lama semua elemen bangsa berkontemplasi dalam kerangka menemukan kesejatian (*good-spot*), kembali ke fitrah dan membangun kecerdasan emosional dan spiritual secara signifikan.

Sudarwan Danim (2003 : 59) menyebutkan juga terjadinya gejala tereduksinya moralitas dan nurani sebagian dari SDM Indonesia, dengan bukti empirik masih tingginya angka kebocoran di lingkungan departemen atau instansi setingkat. Kinerja aparat birokrasi masih berada melampaui *boder area* garis sempadan moralitas yang diidealisasikan kepada pengembalian amanah rakyat. Aksi-aksi korupsi oleh para pejabat birokrasi, berdampak mengerikan.

Gagalnya sistem pendidikan di Indonesia, menurut Didik Hardiono (2003) adalah karena faktor komersialisasi menggeser esensi tujuan pendidikan, dan karena kurang pemahannya penyelenggara negara merumuskan sisdiknas sehingga produk sisdiknas sering menimbulkan pro-kontra, karena tidak berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki manusia Indonesia. Pendidikan lebih banyak mengarah pada hal-hal yang tidak substansi-esensial, dan hanya bersifat materi –kuantifikasi.

Lebih lanjut Didik Hardiono (2003) menyebut bahwa sistem pendidikan dasar dan menengah Indonesia bermasalah, antara lain karena sekolah-sekolah negeri dalam sistem pengajarannya sering berubah-ubah kurikulum, yang membuat peserta didik tidak punya pegangan baku. Ada idiom klasik mengatakan bahwa ganti menteri akan diikuti ganti kebijakan, ganti peraturan, ganti kurikulum, ganti buku, dan seterusnya, yang pada akhirnya sangat membebani masyarakat. Sementara sekolah-sekolah swasta berupaya menunjukkan kelebihanannya untuk persaingan dalam mendapat siswa, yang pada kebanyakan swasta menawarkan kurikulum plus dengan berbagai fasilitas, dan dengan sendirinya mahal. Sekolah plus menekankan anak usia *play-group*, TK, SD, bisa berbahasa Inggris daripada berbahasa daerah. Padahal dalam bahasa daerah juga terselip pendidikan budi pekerti, sikap santun. Akibatnya banyak generasi muda tidak tahu nilai budayanya.

Selain itu menurut Didik Hardiono (2003) sisdiknas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah belum mampu menemu-kenali potensi peserta didiknya, apakah ia akan menjadi olahragawan, intelektual, seniman, dan sebagainya. Padahal pengenalan potensi diri ini harus bisa ditentukan

pada jenjang pendidikan dasar menengah. Fenomena kegagalan sisdiknas pada jenjang pendidikan dasar-menengah juga ditandai adanya gejala demoralisasi dari pendidik maupun peserta didik. Banyak kasus pelecehan seksual, kriminalitas, tawuran pelajar, *free sex*, narkoba, dan lain-lain yang sangat memilukan orang tua dan bangsa umumnya. Ini disebabkan gagalnya pendidikan budi pekerti, akhlak, dan agama. Kegagalan ini lebih disebabkan tidak adanya keteladanan dari lingkungan, serta pengaruh media massa yang tidak bertanggung jawab.

Didik Hardiono (2003) menyebut bahwa sistem pendidikan tinggi juga mengalami kegagalan yang disebabkan pemberlakuan otonomi perguruan tinggi yang belum siap. Konsep otonomi pada kenyataannya hanya membuang-buang waktu, biaya, dan tenaga dan membuka berbagai peluang persaingan tidak sehat. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan masih banyak yang harus dipertanyakan kredibilitasnya, misalnya dosen sangat sibuk dengan proyek di luar daripada mengajar mahasiswanya, mahasiswa hanya dicetak sebagai *captaint of industries*. Mahasiswa yang lulus berprestasi lebih bangga bekerja di luar negeri daripada membangun negeri sendiri.

Iwan Hermawan (2003) mempersoalkan masih rendahnya profesionalisasi guru, dan rendahnya penghargaan akan profesi guru. Di sisi lain kesejahteraan guru yang rendah membuat guru harus berpacu antara ingin sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai pendidik, sekaligus teladan bagi peserta didiknya, dengan keharusan memenuhi kebutuhannya untuk hidup.

Tentang Pendidikan Islam, Mastuhu (1997:81) menyebutkan beberapa masalah antara lain :

- (a) adanya dualisme sistem pendidikan yang pada gilirannya menghasilkan dikotomi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” masing-masing ahlinya tidak saling menegur dan masing-masing alumni dari sistem tersebut menyatakan keahliannya lengkap dengan keberlakuannya di pasaran kerja masing-masing. Dualisme sistem pendidikan juga antara pendidikan “tradisional” dengan pendidikan “modern”. Keduanya terjadi sejak di tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.
- (b) Sistem pendidikan dimanapun, baik dalam jalur “pendidikan agama” maupun “pendidikan umum” sudah terlalu banyak menekankan pada “pelatihan” ketimbang “pendidikan”. Menguatnya kecenderungan untuk memberikan tekanan pada pelatihan ini karena semakin cepatnya

produk-produk IPTEK kadaluarsa. Perbedaan antara pelatihan dengan pendidikan adalah : pendidikan bersifat induktif, dinamis, memahami/berfikir, gagasan, aktif mencari, penemuan, inisiatif, terbuka, imajinatif, dan fleksibel. Pelatihan bersifat deduktif, statis, memori/hafalan, fakta, positif/menerima, dogma, bimbingan, produk final/materi, stabilitas kemampuan, peraturan, tertutup, akal sehat, dan kaku.

- (c) Pendidik sebagai “pengajar” ketimbang sebagai “guru”
- (d) Mementingkan materi ketimbang metodologi
- (e) Dalam metodologi, lebih mementingkan “memiliki” ketimbang “menjadi” (*on becoming*)
- (f) Mementingkan “produk final” ketimbang “proses”
- (g) Menghasilkan “manajer” ketimbang “pemimpin”. Manajer tahu bagaimana mengelola sesuatu, sedang pemimpin tahu apa yang harus dilakukan (menemukan) sedang manajer hanya tahu mengolah.
- (h) Mencari “pembenaran” ketimbang “kebenaran”
- (i) Mengutamakan pemikiran “reaktif” ketimbang “proaktif”

Sudarwan Danim (2003) menyebut terjadinya berbagai penyimpangan moral yang diidealisasikan, seperti memindahkan anak yang tidak naik kelas di sekolah tertentu ke sekolah lainnya, di mana di sekolah yang baru tersebut mereka diterima naik kelas. Munculnya sinyalemen NEM palsu di beberapa daerah, ijazah palsu, nilai ujian palsu, dan sebagainya, juga disinyalir bermuatan uang haram.

Tony Simbolon (2001) menjelaskan bahwa secara umum tujuan dari setiap jenjang pendidikan belum terwujud secara optimal. Indikasinya : *pertama*, banyaknya pengangguran yang mengantongi ijazah sampai tingkat sarjana akibat minimnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki; *kedua*, rendahnya akhlak dan moral yang ditandai oleh maraknya kasus seks, narkoba, dan kekerasan di kalangan siswa atau mahasiswa, kurangnya etika sopan santun, lemahnya disiplin, dan rasa tanggung jawab yang indikasinya sulit diatur dan tertibkan, dan yang paling serius adalah terkikisnya rasa persaudaraan berbangsa, cenderung menuju sukuisme, agamisme, yang akhirnya bermuara pada konflik horizontal; *ketiga*, rendahnya aspek pengetahuan yang indikasinya selain dari UNDP, juga dari hasil nilai ebtanas.

Secara umum, menurut Tony Simbolon (2001), faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan adalah :

- a. belum dipegangnya prinsip kejujuran, ketegasan, dan penuh rasa tanggung jawab serta sportifitas yang tinggi, baik oleh subjek pendidikan maupun oleh objek pendidikan. Contoh nyata masih maraknya lembaga pendidikan yang dengan sangat mudah mengeluarkan ijazah atau gelar tanpa melalui proses pendidikan yang sangat ketat. Akibat hal ini, maka tidak heran jika seseorang sarjana yang baru bekerja dan baru memimpin proyek melaksanakan pekerjaannya secara tidak jujur atau korupsi. Contoh lain masih berlakunya sistem pengkatrolan nilai baik dalam kenaikan kelas maupun dalam pelulusan. Dengan contoh-contoh tersebut tidak heran para generasi muda saat ini cenderung santai atau memilih hidup santai dan tidak mau kerja keras, sehingga lebih condong melaksanakan hal-hal yang gampang mencari duit.
- b. Fungsi sekolah belum berjalan sebagaimana mestinya. Sekolah mempunyai multi fungsi, yaitu : lembaga transfer iptek, lembaga penanaman berbagai nilai sosiokultural, nilai-nilai budi pekerti dan sikap/watak, dan lembaga pemberi keterampilan. Saat ini lembaga sekolah lebih banyak berfungsi sebagai tempat pengajaran beraneka mata pelajaran belaka, dan itupun tidak terlaksana dengan baik, akibat kurang profesionalnya guru. Selanjutnya masalah paling serius adalah menjamurnya sekolah swasta atau perguruan tinggi swasta yang mutunya masih diragukan dan nota bene cenderung mengarah ke bisnis dan turut andil memperburuk citra pendidikan di masyarakat.
- c. Manajemen sekolah belum ditata dengan baik dan belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta diawasi secara ketat.
- d. Persoalan berikutnya adalah kinerja guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas.

Dalam dunia pendidikan telah terlihat adanya pertarungan antara idealisme melawan kapitalisme. Beberapa kasus seperti : tukar guling SLTP 56 di “daerah emas” Melawai Jakarta Selatan, Bogor Agribusiness Center di kampus IPB (Pikiran Rakyat, 18-9-2004). Persoalan siswa yang wajib membeli buku setiap tahun ajaran baru, nilai bisnisnya sangat berangkai mulai dari penerbit, para pengambil kebijakan pendidikan, sampai sekolah-sekolah. Selanjutnya penerimaan mahasiswa lewat uang pangkal yang besar tampaknya tidak lepas juga dari pengaruh kapitalisme.

Ini dasar paham kapitalisme adalah pergerakan modal. Kapitalisme mengajarkan perihal nilai berlebih, yang harus dihasilkan oleh suatu jumlah kapital tertentu dalam rentang waktu secepat mungkin. Kapital hanya bicara soal untung dan uang yang berkuasa atas segalanya. Nilai-nilai lain, terkadang harus tersisih sehingga idealisme pendidikan yang menyatakan pendidikan hak semua warga negara terabaikan. Lingkungan yang tidak bisa menahan kuatnya cengkraman kapital akan membuat filosofi pendidikan tidak dipedulikan. Keterpakuan terhadap kapital, selama ini menjadi penyebab keterlelahan yang panjang dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya.

2.2 Pentingnya Idealisme dalam Pendidikan

Dalam filsafat yang beraliran idealisme memandang bahwa realita itu bukan hakekat kebenaran yang ditangkap oleh panca indera manusia. Ia hanya merupakan gambaran (refleksi) dari kebenaran yang hakiki yang berada di dalam alam “ide”. Realitas yang berupa benda yang ada di alam nyata ini merupakan totalitas (keseluruhan) yang tersusun secara logis dan bersifat spiritual. H.M. Arifin (2000) menyimpulkan bahwa prinsip yang dipegangi oleh idealisme dari zaman ke zaman adalah faktor kejiwaan lebih diutamakan daripada faktor kebendaan atau kejasmanian, karena jiwa merupakan sumber sebab timbulnya realita yang dapat diamati panca indera.

Para filsuf Islam antara lain; Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, dan Ibn Khaldun mengemukakan hubungan antara individu dengan negara. Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan bukan saja dari segi material tetapi juga spiritual oleh sebab itu kehidupan dunia juga harus berarti mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Al-Mawardi terkenal dengan Kontrak Sosial. Perbedaan individu dalam inteligensi dan bakat mendorong manusia untuk bekerjasama (H.A.R. Tilaar, 2000:28-29).

Pendidikan menurut John Dewey (sebagaimana dikutip H.M. Arifin, 2000:1) merupakan suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional), menuju ke arah tabiat manusia.

Dalam Islam pendidikan dilaksanakan sebagai bimbingan terhadap perkembangan rohani dan jasmani dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam (Hasil seminar Pendidikan Islam, 1960).

Menurut H.M. Arifin (2000) istilah membimbing, mengarahkan, dan mengasuh serta mengajarkan atau melatih mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan yaitu menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur sesuai ajaran Islam.

Schoorl (1982) sebagaimana dikutip Sudarwan Danim (2003) berpendapat bahwa, praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas tertinggi. Di Indonesia tujuan pendidikan nasional diidealisasikan sebagaimana termuat dalam UU SPN Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal 1 Ketentuan Umum UUSPN tersebut dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Nurcholis Madjid (2001) menjelaskan pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi hidup yaitu : (a) penanaman rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan (b) pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama. Bagi umat Islam, berdasarkan tema-tema Al-Qur'an, penanaman rasa taqwa kepada Tuhan sebagai dimensi pertama hidup ini dimulai dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama berupa ibadat-ibadat yang disertai penghayatan yang sedalam-dalamnya. Oleh Indra Djati Sidi (2001) dinyatakan bahwa pendidikan pada gilirannya berperan mempersiapkan setiap orang untuk selalu berperilaku penuh adab (*civility*), yang akhirnya berperan menciptakan masyarakat beradab (*Civilize culture society*).

Manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak capaian tujuan pendidikan nasional merupakan proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati.

Jika idealisasi itu menjelma dalam realita, pada siswa ketika lulus, maka akan menjadi modal utama lahirnya SDM terampil, duduk pada jajaran terdepan, memiliki moralitas yang tinggi. Selanjutnya ketika mereka duduk dalam jajaran birokrasi pada tingkat manapun, komitmen moralnya seyogyanya makin kokoh dengan diikat sumpah jabatan.

Pendidikan sejati merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan, dan pemanusiaan yang normal. Pendidikan moral kemasyarakatan memang bukan hanya pendidikan persekolahan.

Oleh karena itu, meningkatkan peranan pendidikan di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia baru merupakan perwujudan gerakan reformasi masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat madani Indonesia (H.A.R. Tilaar, 2000:27).

3. Pembahasan

3.1 Problem Pendidikan Indonesia Saat ini

Keberadaan dan masa depan pendidikan Indonesia saat ini sangat sulit diprediksi dan digambarkan hasilnya. Akan seperti apa kualitas SDM bangsa ini ke depan masih menyisakan kekhawatiran, karena ketertinggalan dalam IPTEK yang harus dikejar, harus pula diikuti dengan penurunan dan kemerosotan moral pada sebagian anak bangsa ini. Dua masalah pokok pendidikan seperti dikemukakan Nurcholis Madjid (2001) yaitu proses penanaman rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan rasa kemanusiaan yang ditandai kemampuan mensejahterakan dirinya dan masyarakatnya, masih menjadi agenda besar serta harapan ideal. Berbagai problem pendidikan yang muncul saat ini sebagaimana dikemukakan di atas terasa sangat kompleks. Di antara problem tersebut yang cukup serius mengancam kualitas pendidikan dalam melahirkan SDM yang handal adalah:

a. Telah terjadi berbagai penyelewengan dan ketidakjujuran dalam pendidikan formal

Temuan para pemerhati pendidikan telah menunjukkan bagaimana ketidakjujuran terjadi di berbagai aspek dalam pelaksanaan pendidikan. Ijazah palsu, Nilai UAN palsu, naik kelas dipaksakan, pembocoran dana dalam proyek-proyek pendidikan seperti pembangunan gedung, penyiapan sarana prasarana, proyek buku, dan sebagainya merupakan contoh-contoh kasus nyata yang beritanya sudah dianggap biasa, dan seringkali sudah dianggap wajar serta dapat dibenarkan. Padahal persoalan ini sangat krusial dalam perbaikan kuantitas maupun kualitas pendidikan.

Di sisi lain dalam proses pembelajaran seringkali sebagian guru maupun dosen mengajar seadanya, sekedar melepaskan tanggung jawab, tanpa memikirkan dampak dari pengajarnya apakah berhasil atau tidak keterlambatan masuk ke kelas, rendahnya disiplin guru, serta kekurangsiapan guru maupun dosen dalam pembelajaran sebagai wujud ketidakjujuran pada diri mereka sendiri juga persoalan yang sederhana dalam sebagian besar dunia pendidikan formal, dan masih terlalu sedikit mendapatkan perhatian.

Dalam hal riset-riset dosen di Perguruan Tinggi maupun dalam proyek penelitian yang dilakukan di masyarakat, seringkali terjadi pembengkakan pendanaan, yang tidak seimbang dengan mutu dan keterpakaian penelitiannya. Inipun dianggap biasa. Sampai saat ini belum terjadi korelasi yang signifikan antara jumlah penelitian yang dilakukan dengan upaya peningkatan mutu maupun pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen. Kondisi sangat berbeda terjadi di Malaysia, salah seorang tim peneliti kimia dari UTM, mengungkapkan bahwa sebagai peneliti, dia diberi gaji yang memadai dan mencukupi, dan untuk meneliti dia diberikan *wewenang* menggunakan zat-zat yang ingin diujinya sesuai kebutuhan. Tidak ada dana sisa bahan atau apapun namanya, yang bisa menambah insentif peneliti. Dana penelitian, murni untuk meneliti, dan gaji atau insentif juga murni.

Berbagai proyek buku di tingkat sekolah Dasar dan Menengah sepertinya sangat tidak berpihak pada peserta didik maupun masyarakat. Buku-buku dengan isi pokok yang sama dan masih relevan untuk dipakai, harus selalu diperbarui setiap tahun, meskipun hanya sekedar mengganti contoh-contoh dan konsep atau tampilan buku. Padahal dengan sedikit kreatifitas guru saja buku-buku itu akan tetap adaptif dengan zaman maupun kurikulum. Secara ideal pendidikan diberikan untuk semua anak dalam semua situasi dengan berbagai cara, tapi karena keharusan membeli buku, anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa jadi tidak diizinkan belajar karena tidak punya buku. Mestinya lebih jauh dicermati lagi “sebetulnya dalam proses pembelajaran yang penting anak mempunyai buku atau menguasai ilmunya?”

Pada sisi lain upaya untuk menghentikan ataupun mengurangi berbagai kecurangan dan ketidakjujuran tersebut melalui jalur hukum sangat lemah. Tidak jelas sanksi hukum bagi pelanggaran-pelanggaran dalam dunia pendidikan. Sangat sedikit sekali kasus penyelewengan yang dihukum dibanding jumlah pelanggaran yang terjadi.

Kegagalan proses pendidikan saat ini dalam hal moral adalah karena lemahnya penghayatan akan makna hidup, dan hilangnya idealisme dalam pendidikan.

Dalam Islam Rasulullah SAW dijadikan panutan sepanjang masa, karena beliau bisa menjadi teladan.

b. Antara konsep pembaruan pendidikan dengan yang dilaksanakan pelaku pendidikan kadang belum sejalan.

Pada tataran pelaksanaan pendidikan, para pendidik atau praktisi pendidikan seringkali dibingungkan oleh kebijakan pendidikan dari tingkat atas. Paulo Freire yang dikutip Adeng Muchtar Ghazali (2003) mengilustrasikan bahwa pendidikan di dunia ketiga senantiasa berada dalam hegemoni kepentingan-kepentingan politik para penguasa.

Pemberlakuan suatu kebijakanpun tidak jarang kurang memperhatikan tataran praktis, misalnya antara kebijakan, sosialisasi, dan kewajiban untuk melaksanakannya sangat pendek waktunya. Salah satu contoh yang paling aktual adalah berkaitan dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang menurut aturannya sudah harus diberlakukan tahun akademik 2004/2005 di semua jenjang pendidikan mulai dari pra sekolah sampai SLTA, bahkan sudah akan keluar juga aturan untuk Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dengan KBK menuntut guru mengajar dengan kreatif, menggunakan berbagai sumber belajar, mampu menciptakan pembelajaran aktif pada siswa, berperan sebagai fasilitator, sedangkan sekolah harus menyediakan berbagai media maupun prasarana bagi membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Di sisi lain guru harus mengubah paradigmanya dalam mengajar dari berpusat pada dirinya dengan berpusat pada siswa.

Secara konsep pembelajaran dengan KBK, diharapkan mampu memfasilitasi perbedaan individual anak, karena anak diberikan keleluasaan waktu untuk mencapai target kompetensi yang ditetapkan, kemudian anak difasilitasi dengan berbagai media dan metoda pembelajaran. Keberhasilan anak belajar betul-betul diukur dari ketercapaian target kompetensi yang ditetapkan. Konsep ini dirasa cukup baik untuk diterapkan di Indonesia,

dalam rangka mempersiapkan SDM yang handal untuk berperan di era global.

Pada tataran aplikatif, persoalan pemberlakuan KBK ternyata lebih rumit. Belum semua guru memahaminya, belum semua sekolah siap, dan ada penyelenggara yang baru mendapat informasi KBK pada tataran pengenalan. Hasil wawancara dengan salah seorang guru TK tentang bagaimana dia akan melakukan pembelajaran dengan KBK, ternyata guru masih belum memahami bedanya mengajar dengan KBK dan mengajar dengan kurikulum yang lama. Di SLTP dan SLTA pemahaman tentang KBK juga masih belum memadai, guru-guru masih menyamakan antara perumusan. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) dengan Kompetensi yang harus dikuasai siswa pada perencanaan pembelajaran. Guru-guru belum cukup kreatif dalam merangsang siswa belajar aktif. Ada guru yang lebih banyak berceramah dan menuntut hapalan siswa dibanding merangsang siswa untuk belajar. Kenyataannya pendekatan dan cara mengajar yang lama tidak begitu saja dengan mudah bisa diubah guru. Bila diteliti lebih jauh antara sekolah di kota-kota dengan jauh di berbagai pelosok Indonesia, tentu tingkat pemahaman dan aplikasi KBKnya pun akan semakin terlihat bervariasi. Mencermati keadaan tersebut bagaimana mungkin diberlakukan ujian akhir dengan standar yang sama? Pada kenyataannya program tersebut terus digulirkan meskipun mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Ketidakajekan kebijakan pendidikan satu sisi dapat dianggap sebagai dinamika dalam dunia pendidikan untuk menuju kemajuan, namun di sisi lain dapat juga membuat semakin kaburnya visi dan misi pendidikan. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, takaran ketercapaian tujuan pendidikan adalah manusia cerdas dalam seluruh aspek kepribadiannya. Sebagaimana dinyatakan Arief Rahman (2004), sukses pendidikan bukan hanya memprioritaskan pada nilai-nilai akademis, tapi pendidikan yang sukses mampu membangun secara utuh jati diri anak, terutama pembentukan karakter bangsa yang kokoh. Anak yang sukses adalah anak yang **bertaqwa, berkepribadian matang, berilmu mutakhir, dan berprestasi, mempunyai rasa kebangsaan, dan berwawasan global**. Pergeseran cara pandang dalam melihat kesuksesan proses pendidikan juga tidak terlepas dari kebijakan yang telah dibuat para pembuat kebijakan pendidikan.

Kebijakan pemerintah dalam penghargaan bagi guru dan tenaga pendidik, turut membuat pendidikan sulit diangkat. Pendidikan bermutu akan diberikan oleh pendidik yang bermutu juga. Pendidik yang bermutu

akan lahir dari proses pembinaan calon pendidik yang juga bermutu. Profesi guru yang kurang diminati, tidak terlepas dari rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan guru. Terjadinya berbagai kecurangan dalam dunia pendidikan bisa jadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar para praktisi pendidikan, rendahnya kinerja guru, dan bukan tidak mungkin karena rendahnya penghargaan terhadap profesi.

c. Idealisme para pelaku pendidikan seringkali hanya utopia, bukan sikap dan perilaku

Dalam berbagai sambutan, seminar, dan diskusi tidak pernah berhenti diingatkan tujuan dan hakekat pendidikan, namun apa yang dibicarakan tersebut kadangkala justru tidak tercermin dalam sikap dan perilaku hidup para pelaku pendidikan.

Pendidik teladan bagi peserta didiknya. Tapi rendahnya kinerja, kurangnya rasa tanggungjawab, bekerja jika menguntungkan, lebih banyak menuntut daripada berbuat, mentolerir kesalahan, justru tanpa sadar telah dicontohkan oleh sebagian pendidik pada peserta didik. Yang paling sederhana, misalnya, siswa dilarang merokok, tapi guru boleh merokok waktu mengajar.

Berdasarkan pengungkapan dari beberapa guru SLTP dan SLTA diketahui berbagai tips sekolah dalam menghadapi UAN. Umumnya para pendidik ingin peserta didiknya memperoleh nilai UAN tinggi dan minimal semua siswa di sekolahnya lulus (mencapai nilai minimal sesuai *grade* yang ditetapkan). Maka siswa yang tidak mencapai angka tersebut dibantu dengan ujian ulangan, atau yang lebih fatal guru mengganti lembar jawabannya. Untuk menghadapi UAN, di sekolah-sekolah muncul tim sukses-tim sukses yang tugasnya adalah mengupayakan setiap siswa di sekolah tempat dia mengajar lulus, meskipun dengan cara-cara “memanipulasi”. Akibat ini semua muncullah keanehan-keanehan, karena ternyata ada siswa yang jarang masuk sekolah dan malas malah lulus, sementara anak yang rajin gagal.

Para pendidik dan penyelenggara pendidikan tampaknya telah kehilangan idealisme. Siapakah lagi yang bisa diharapkan melahirkan generasi unggul, pemimpin yang benar, pemimpin yang bermoral dan berakhlak, pemimpin-pemimpin yang bertakwa ? Pertanyaan berikutnya, sampai kapan dunia pendidikan akan “sakit” seperti ini?

Bila dicermati lebih jauh ternyata bukan hanya sebagian dari pendidik di sekolah yang telah kehilangan idealismenya dalam mendidik, sebagian orangtuapun telah kehilangan idealisme. Betapa banyak kasus yang tidak terungkap dalam pemberian uang tambahan kepada sekolah ataupun guru dalam proses penerimaan siswa baru. Berapa banyak juga kasus seleksi yang mestinya ketat, “dibuat” oleh orang tua yang berduit menjadi sederhana, bahkan formalitas. Tujuan pendidikan sebagai idealisasi pendidikan, sudah terlalu sering terabaikan oleh kepentingan berbagai pihak. Peserta didik seringkali menjadi korban dari para pendidik yang telah kehilangan jati diri dan idealismenya.

Menyimak proses pendidikan yang ada dengan segala polemiknya, tidaklah dapat kesalahan anak dalam bersikap, berperilaku, dan kegagalannya dalam menampilkan perilaku bermoral dan terdidik ditimpakan kepada anak saja, tapi simaklah apa yang telah dialaminya selama dalam proses pendidikan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat.

d. Pendidikan akhlak dan moral sebagai kunci untuk memperbaiki mutu pendidikan belum mendapatkan perhatian serius.

Perhatian sekolah dan dunia pendidikan umumnya masih lemah pada pengembangan *Emotional Question* (EQ) dan *Spiritual Question* (SQ) dibanding pengembangan *Intelligence Question* (IQ). Ini dapat menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena akhlak buruk.

Pembelajaran agama yang masih lebih banyak berorientasi kognitif, membuat lemahnya penghayatan terhadap hakekat hidup beragama. Keterbatasan waktu belajar agama, yang tidak memungkinkan anak mempraktekkan pelajaran agama, serta mendiskusikan berbagai persoalan kehidupan dari sisi agama, turut pula memicu lemahnya penghayatan terhadap kehidupan yang religius.

Upaya perbaikan mutu pendidikan agama masih lebih banyak pada tataran konsep, belum aplikatif. Di sisi lain umumnya di sekolah-sekolah negeri jumlah siswa perkelas mencapai 40 orang bahkan lebih, tentulah sulit bagi guru agama untuk mengenali setiap sikap dan perilaku siswanya, apalagi jika dalam satu minggu ia hanya bisa bertemu dua jam pelajaran. Ditambah lagi dengan jumlah guru agama yang terbatas, misalnya di satu SD, hanya ada satu orang guru agama.

Persoalan penghayatan pendidikan tidak dapat dianggap sama dengan sekedar mengajarkan agama. Ini berkaitan dengan pengembangan potensi spiritual anak.

3.2 Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia masa depan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki mutu SDM bangsa yaitu :

- a. **Pada pelaku pendidikan mulai dari pengambil kebijakan sampai pada pendidik dan praktisi pendidikan perlu membangun dan memperbaiki lagi idealisme dalam melaksanakan tugas pendidikannya.** Tujuan pendidikan nasional sebagai idealisasi pendidikan dijadikan patokan ideal bagi para penyelenggara pendidikan. Menjadi pendidik idealis berarti berupaya melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan punya komitmen sebagai pendidik.
- b. Menurut Arief Rahman (2004) guru memegang kunci keberhasilan proses pendidikan, dan untuk itu guru yang mendukung proses tersebut adalah :
(a) *pupil centered* (berorientasi pada siswa). Guru harus melakukan pendekatan yang berpusat pada anak, sehingga sikap serta keterampilan berfikir anak terbentuk;. (b) *dinamic* (dinamis). Metode pembelajarannya dinamis, tidak membosankan, dan mampu merangsang anak berfikir kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan hidup. (c) *democratyc* (demokratis). Antara guru dan siswa akan terbangun kultur saling menghargai dan menghormati.
Semua tuntutan pada guru tersebut tidak mungkin terwujud jika guru sendiri kehilangan idealismenya.
- c. **Perlu ketegasan hukum yang jelas, bagi berbagai pelanggaran dalam dunia pendidikan. Tindakan tegas terhadap para pelaku pendidikan harus dimulai dari pemegang kebijakan sampai pendidik dan praktisi, tanpa pandang bulu.** Kesadaran untuk mementingkan tugas dibanding keinginan memenuhi kebutuhan dan memuaskan kebutuhan pribadi menjadi kunci bagi membangun moralitas dalam dunia pendidikan. Berbagai ketidakjujuran dan kebocoran anggaran pendidikan tidak bisa dibiarkan begitu saja jika ingin pendidikan ini berkualitas. Di sisi lain penegakan hukum yang konsisten, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan para pelaku pendidikan untuk jalur pendidikan formal.

- d. **Para pembuat kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan dengan matang segala kebijakannya sebelum ditetapkan untuk dilaksanakan.** Mengubah-ubah kebijakan dalam pendidikan hanya karena berbagai kepentingan, akan sangat merugikan dunia pendidikan.
- e. **Pendidikan moral dan akhlak perlu menjadi perhatian dan tanggungjawab setiap pendidik bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab guru pendidikan agama.** Para pendidik baik itu guru maupun orang tua harus mampu menjadi model dalam sikap dan perilaku bermoral. Efek era global dengan masuknya nilai-nilai dari berbagai belahan dunia perlu dihadapi dengan memperkuat nilai-nilai bangsa pada diri setiap anak, terutama nilai-nilai religius sebagai fondasi moral.
- Dikotomi keilmuan, antara ilmu agama dengan ilmu umum, dan ilmu tradisional dengan ilmu modern, sudah saatnya ditinggalkan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Problem pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks baik tataran kebijakan maupun pelaksanaan, baik untuk meningkatkan kuantitas apalagi untuk kualitas. Beberapa problem pokok yang turut mempengaruhi mutu pendidikan tersebut adalah :
- (1) Telah terjadi berbagai penyelewengan dan ketidakjujuran dalam pendidikan formal.
 - (2) Antara konsep pembaruan pendidikan dengan yang dilaksanakan pelaku pendidikan kadangkala belum sejalan.
 - (3) Idealisme para pelaku pendidikan seringkali hanya utopia, bukan sikap dan perilaku.
 - (4) Pendidikan akhlak dan moral sebagai kunci untuk memperbaiki mutu pendidikan belum mendapatkan perhatian serius.
- b. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki mutu pendidikan adalah :
- (1) Para pelaku pendidikan mulai dari pengambil kebijakan sampai pada pendidik dan praktisi pendidikan perlu membangun dan

memperbaiki lagi idealisme dalam melaksanakan tugas pendidikannya.

- (2) Perlu ketegasan hukum yang jelas, bagi berbagai pelanggaran aturan dalam dunia pendidikan
- (3) Para pembuat kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan dengan matang segala kebijakannya sebelum ditetapkan untuk dilaksanakan.
- (4) Pendidikan moral dan akhlak perlu menjadi perhatian dan tanggungjawab setiap pendidik, bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab guru pendidikan agama.

4.2 Saran

- a. Bagi para pemegang kebijakan pendidikan, sangat diharapkan lebih mementingkan kondisi dan keadaan masyarakat yang akan jadi subjek didik.
- b. Bagi para pelaku pendidikan, dan terutama guru dan orang tua diharapkan tidak mengabaikan hakekat dan tujuan pendidikan sesungguhnya, yang lebih berorientasi pada pengembangan anak.
- c. Sangat diharapkan orang-orang yang berada pada dunia pendidikan komitmen dengan tugasnya, dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya dengan ikhlas.
- d. Bagi penegak hukum, diharapkan tegas dan konsekuen dalam menegakkan kebenaran, karena SDM yang baik akan lahir dari proses pendidikan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M. 2000. *Filsafat Pendidikan Islam*. (cet.6). Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Dryden, Gordon & Jeanette Vos. 2001. *The Learning Revolution*. (terjemahan). Bandung : Kaifa.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2003. "Buah Simalakama Sistem Pendidikan Tinggi". *Pikiran Rakyat*. Sabtu 5 April 2003. hal 20.
- Hardiono, Didik. 2003. "Gagalnya Sistem Pendidikan Nasional". *Pikiran Rakyat*. Jum'at 2 Mei 2003. hal 18.
- Hermawan, Iwan. 2003. "Guru, Antara Kebutuhan Hidup dan Profesionalisme". *Pikiran Rakyat*. Jum'at 2 Mei 2003 hal. 18.
- Ilyas, Yanuar. 2004. "Pendidikan Anantara Idealisme dan Realitas Masyarakat". <http://www.muhammadiyah-online.or.id/mtavo/01>.
- Jalal, Fasli. 2002. "Pentingnya Pendidikan Anak Dini Usia Dalam Membangun Masa Depan Bangsa yang Berkualitas". Makalah. tidak diterbitkan.
- Madjid, Nurcholish. 2001. *Pendidikan Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas Menuju Masyarakat Belajar* (Pengantar). Cet.1. Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Mastuhu. 1997. *Menuju Paradigma baru pendidikan Indonesia. Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional*. (Editor M. Dawam Rahardjo). Jakarta : PT. Internusa
- Pikiran rakyat 2004. Pendidikan vs Kapitalisme. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904>.
- Rachman, Arief. 2004. "Sekolah Unggulan, Sekolah Masa Depan". Makalah disampaikan dalam seminar tentang Sekolah Masa Depan di MtsT. Asih Putra Cimahi (tidak diterbitkan).
- Sidi, Indra Djati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar (Menggagas Paradigma Baru Pendidikan)*. Jakarta : Paramadina.
- Simbolon, Tony. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Sekolah. <http://www.depdiknas.go.id/publikasi/buletin/Pppg-Tertulis>.
- Zohar, danah & Ian Marshall. 2000. *SQ (Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan)*, Bandung : Mizan.